

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Riyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Afifudin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Cv Pustaka Setia.
- Akadun. 2009. *Teknologi informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Donald, F. Norr s. 2000, *CurrentIssues and Trends in E- Government Research*,an
teknologi: University of Maryland,Baltimore County, USA
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *E-Government in action*. Yogyakarta: Andi.
- Indrajit, Richardus Eko. 2016. *Electronic Government Strategi Pembangunan
dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*.
Yogyakarta: Andi.
- Kristanto, Andri. 2007. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Klaten:
Gava Media.
- Rianto, B., Lestari, T. 2012. *Poiri dan Aplikasi E-Government dalam Pelavanoan
Publik*. Putra Media.Nusantara (PNM): Surabaya.
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
PT Alfabet.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Jurnal :

Delanno, Galuh Fajar & Deviani. 2013. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal WRA*.

Redha Suhari Rachman. 2021. “Efektivitas Penerapan Sistem *E-Government* dalam Pelayanan publik di kelurahan sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN*.

Iwan Setiawan. 2016. “Pengelolaan E-Government Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN*.

Sumber Lain :

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang kebocoran data Publik.

Undang-Undang No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan data Terbuka.